

**ANALISIS KETIDAKSANTUNAN BAHASA DAN PELANGGARAN MAKSIM
DALAM KASUS VIRAL LPDP DI MEDIA SOSIAL**

Arum Melati¹, Feby Valentina², Nabila Syafira Siregar³,
Revalina Erdiyanti⁴, Siti Rahimah⁵

¹⁻⁵Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Medan

¹arummelati746@gmail.com, ²febyvlntnn@gmail.com

ABSTRACT

This study examines language impoliteness and violations of politeness maxims in netizen comments on a viral LPDP case on social media. The problem addressed is the increasing use of impolite language in public digital discussions. The objective of this research is to identify the forms of language impoliteness, types of maxim violations, and how netizens express criticism, satire, and insults. This study employs a descriptive qualitative method with a pragmatic approach. Data were collected through observation and documentation of TikTok comments related to the case, then analyzed using Leech's Politeness Principle and Grice's Cooperative Principle. The findings reveal that impoliteness commonly appears in the form of satire, mockery, accusations, and degrading expressions. The most frequently violated maxims are the approbation maxim and tact maxim. These results indicate that netizens tend to deliver criticism in a direct and emotional manner without considering politeness norms, causing public discussions to shift from substantive issues to personal attacks. Therefore, awareness of polite language use is necessary to maintain constructive communication in digital spaces

Keywords: language impoliteness, politeness maxim, social media, LPDP case

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketidaksantunan bahasa dan pelanggaran maksim kesantunan dalam komentar warganet pada kasus viral LPDP di media sosial. Permasalahan yang diangkat adalah meningkatnya penggunaan bahasa tidak santun dalam diskusi publik digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksantunan bahasa, jenis pelanggaran maksim, serta cara warganet menyampaikan kritik, sindiran, dan hujatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pragmatik. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi komentar pada media sosial TikTok, kemudian dianalisis menggunakan teori Prinsip Kesantunan Leech dan Prinsip Kerja Sama Grice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksantunan bahasa umumnya muncul dalam bentuk sindiran, ejekan, tuduhan, dan ungkapan yang merendahkan. Maksim yang paling sering dilanggar adalah maksim penghargaan dan maksim kebijaksanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa

warganet cenderung menyampaikan kritik secara langsung dan emosional tanpa memperhatikan norma kesantunan, sehingga diskusi publik bergeser dari substansi masalah menjadi serangan personal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dalam penggunaan bahasa yang santun agar komunikasi di ruang digital tetap sehat dan konstruktif

Kata Kunci: ketidaksantunan bahasa, maksim kesantunan, media sosial, kasus LPDP

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan media sosial saat ini membuat masyarakat semakin mudah untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun tanggapan terhadap berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi publik bagi masyarakat. Namun, kebebasan dalam menyampaikan pendapat di media sosial sering kali membuat sebagian pengguna tidak lagi memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Hal ini menyebabkan banyak komentar yang mengandung kata-kata kasar, sindiran, maupun hujatan terhadap pihak tertentu.

Salah satu kasus yang baru-baru ini menjadi perbincangan luas di media sosial adalah kasus yang berkaitan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kasus ini

bermula dari pernyataan seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengatakan "cukup saya saja yang WNI, anak saya jangan" dalam sebuah unggahan di media sosial. Pernyataan tersebut kemudian menjadi viral dan memicu berbagai reaksi dari warganet. Banyak pengguna media sosial yang memberikan tanggapan dalam bentuk kritik, sindiran, bahkan hujatan terhadap pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Berbagai komentar yang muncul menunjukkan adanya penggunaan bahasa yang tidak santun serta pelanggaran terhadap prinsip kesantunan dalam berbahasa.

Dalam kajian pragmatik, kesantunan berbahasa merupakan hal yang penting dalam menjaga hubungan sosial dan menciptakan komunikasi yang baik. Mislikhah (2014: 287) mendefinisikan kesantunan sebagai aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati

bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang berlaku dalam perilaku sosial. Kesantunan berbahasa berkaitan dengan cara seseorang menyampaikan maksud atau pendapatnya tanpa menyinggung atau merendahkan pihak lain. Namun, dalam diskusi di media sosial, pelanggaran terhadap prinsip kesantunan dan maksim percakapan sering kali terjadi, terutama ketika masyarakat menanggapi isu-isu yang bersifat kontroversial.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis bentuk-bentuk ketidaksantunan bahasa yang muncul dalam komentar warganet terhadap kasus LPDP yang viral di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran maksim kesantunan berbahasa serta melihat bagaimana warganet menyampaikan kritik, sindiran, dan hujatan terhadap pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan bahasa dalam komunikasi di media sosial serta meningkatkan kesadaran

masyarakat agar lebih memperhatikan kesantunan berbahasa ketika menyampaikan pendapat di ruang publik digital.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui bentuk-bentuk ketidaksantunan bahasa dalam komentar warganet terhadap kasus LPDP; (2) mengidentifikasi maksim kesantunan yang paling sering dilanggar; (3) menganalisis cara warganet menyampaikan kritik, sindiran, dan hujatan ditinjau dari prinsip kesantunan berbahasa; (4) mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya bahasa tidak santun; (5) mengetahui dampak penggunaan bahasa tidak santun terhadap kualitas diskusi publik; dan (6) memberikan solusi untuk meminimalkan ketidaksantunan berbahasa di media sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian pragmatik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung komentar-komentar warganet pada unggahan di media

sosial yang membahas kasus LPDP yang sedang viral. Peneliti membaca dan memperhatikan berbagai tanggapan yang diberikan oleh warganet, khususnya komentar yang mengandung kritik, sindiran, maupun hujatan yang berpotensi menunjukkan adanya ketidaksantunan berbahasa.

Selanjutnya, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan komentar-komentar tersebut sebagai data penelitian. Data dikumpulkan melalui tangkapan layar (*screenshot*) yang relevan dari media sosial *TikTok* yang membahas kasus LPDP. Setelah itu, komentar-komentar yang telah dikumpulkan dipilih dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk ketidaksantunan bahasa serta kemungkinan pelanggaran maksimum kesantunan berbahasa. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui bentuk ketidaksantunan bahasa, jenis pelanggaran maksimum, serta cara warganet menyampaikan kritik atau tanggapan terhadap kasus tersebut.

Analisis data menggunakan teori Prinsip Kesantunan Leech yang mencakup enam maksimum, serta Prinsip Kerja Sama Grice.

Pendekatan analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tuturan warganet yang terindikasi melanggar prinsip-prinsip kesantunan berbahasa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Ketidaksantunan Bahasa dalam Komentar Warganet

Kesantunan atau kesopanan merupakan tata cara, kebiasaan, dan aturan perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kesantunan dipahami sebagai seperangkat norma yang telah disepakati bersama oleh anggota masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak laku dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kesantunan sering pula disebut sebagai tatakrama, yaitu aturan yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dalam berinteraksi dengan orang lain (Mislikhah, 2014).

Apabila seseorang menggunakan bahasa tanpa memperhatikan tata cara dan norma budaya yang berlaku, maka hal tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. Orang tersebut dapat dianggap sombong, angkuh, tidak peduli terhadap orang lain, bersifat egois, tidak memiliki tata

krama, bahkan dinilai tidak berbudaya (Mislikhah, 2014: 288). Oleh sebab itu, kesantunan berbahasa menjadi hal penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial di masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap komentar warganet pada unggahan media sosial yang membahas kasus LPDP Dwi Sasetyaningtyas, ditemukan beberapa bentuk ketidaksantunan bahasa. Bentuk-bentuk tersebut antara lain berupa sindiran, ejekan, tuduhan, serta komentar yang merendahkan pihak tertentu. Adapun data tersebut sebagai berikut:

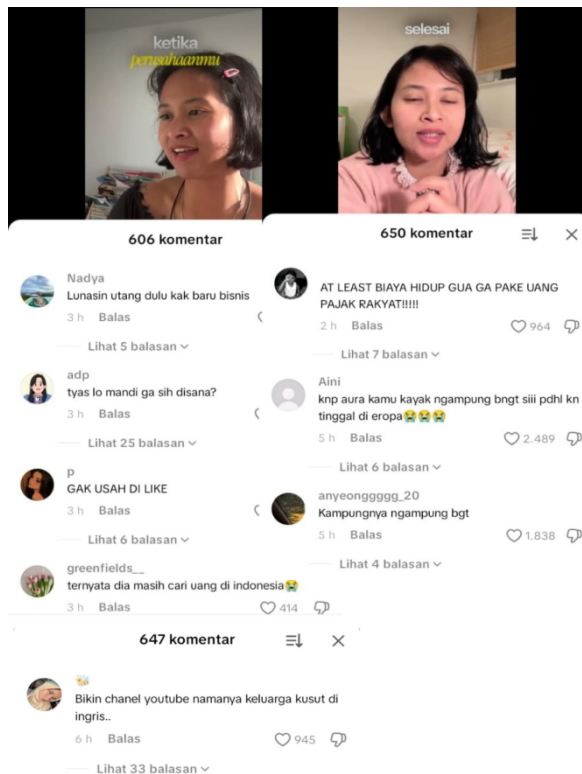
- a. @tawon: "Bikin chanel youtube namanya keluarga kusut di inggris." Komentar tersebut menunjukkan bentuk sindiran yang bertujuan merendahkan pihak yang dibicarakan.
- b. @anakkecil: "AT LEAST BIAYA HIDUP GUA GA PAKE UANG PAJAK RAKYAT!!!!!" Terdapat komentar yang bersifat menyalahkan atau menuding secara langsung. Komentar ini menunjukkan ekspresi kemarahan dan tuduhan yang diarahkan kepada pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
- c. @aini: "knp aura kamu kayak ngampung bngt siiii pdhl kn tinggal di eropa" Komentar ini menunjukan

bentuk ketidaksantunan yang bernada mengejek dan meremehkan.

- d. @anyeongggg_20: "Kampungnya ngampung bgt." Komentar tersebut menunjukkan bentuk penghinaan terhadap latar belakang atau citra seseorang.

- e. @Nadya: "Lunasin utang dulu kak baru bisnis" Komentar ini bersifat menyudutkan dan menilai secara negatif, pasalnya kesal terhadap perilaku mitra tutur yang bersikap bodoamat.

- f. @greenfields__: "ternyata dia masih cari uang di indonesia." Komentar tersebut menunjukkan penilaian negatif yang disampaikan secara langsung tanpa mempertimbangkan kesantunan dalam berbahasa.



Gambar 1 Kumpulan Komentar
Warganet

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk ketidaksantunan yang muncul dalam komentar warganet umumnya berupa sindiran, ejekan, tuduhan, serta ungkapan yang merendahkan pihak tertentu. Dalam kegiatan bertutur, seseorang sebaiknya selalu memperhatikan prinsip kesantunan berbahasa agar tidak menimbulkan perasaan tersinggung pada pihak lain. Dengan memperhatikan kesantunan tersebut, proses komunikasi antara penutur dan mitra tutur dapat berlangsung dengan baik sehingga keduanya dapat saling memahami

maksud yang disampaikan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang memperhatikan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi (Vani & Sabardila, 2020).

Kurangnya perhatian terhadap kesantunan berbahasa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah munculnya kesalahpahaman, pertentangan, bahkan perselisihan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena tuturan yang disampaikan oleh seseorang dapat dianggap menyinggung atau menyakiti perasaan lawan bicaranya. Oleh sebab itu, penerapan kesantunan berbahasa sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial.

2. Pelanggaran Maksim Kesantunan Berbahasa oleh Warganet

Berdasarkan analisis menggunakan prinsip kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Leech, ditemukan bahwa beberapa maksim kesantunan dilanggar oleh warganet dalam memberikan komentar terhadap kasus LPDP Dwi Sasetyaningtyas di media sosial.

Namun, maksim yang paling sering dilanggar adalah maksim penghargaan (*approbation maxim*) dan maksim kebijaksanaan (*tact maxim*).

a. Maksim Penghargaan

Maksim penghargaan mengharuskan penutur untuk meminimalkan celaan terhadap orang lain dan memaksimalkan pujian atau penghargaan kepada pihak lain. Dalam data komentar warganet pada kasus LPDP, ditemukan beberapa tuturan yang melanggar maksim ini karena mengandung ejekan, sindiran, dan penilaian negatif terhadap individu yang dibicarakan. Contoh komentar yang termasuk pelanggaran maksim penghargaan yaitu: "knp aura kamu kayak ngampung bngt siiii pdhl kn tinggal di eropa"; "Kampungnya ngampung bgt."; dan "Bikin chanel youtube namanya keluarga kusut di inggris." Tuturan tersebut dianggap melanggar maksim penghargaan karena penutur justru memberikan ejekan dan merendahkan citra orang lain di ruang publik.

b. Maksim Kebijaksanaan

Maksim kebijaksanaan menekankan bahwa penutur seharusnya meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan

keuntungan bagi orang lain dalam bertutur. Namun, dalam beberapa komentar warganet ditemukan tuturan yang menunjukkan sikap menyerang secara langsung tanpa mempertimbangkan dampak tuturannya. Contoh komentar yang termasuk pelanggaran maksim kebijaksanaan yaitu: "AT LEAST BIAYA HIDUP GUA GA PAKE UANG PAJAK RAKYAT!!!" dan "Lunasin utang dulu kak baru bisnis." Tuturan tersebut melanggar maksim kebijaksanaan karena penutur menyampaikan kritik dan tuduhan secara langsung dengan nada yang menyudutkan.

c. Maksim Kesepakatan

Maksim kesepakatan mengharuskan penutur untuk memaksimalkan kesepakatan dan meminimalkan ketidaksepakatan dalam komunikasi. Akan tetapi, dalam data komentar warganet ditemukan tuturan yang lebih menonjolkan ketidaksetujuan secara tajam tanpa disampaikan secara santun. Contoh komentar yang menunjukkan pelanggaran maksim kesepakatan yaitu: "ternyata dia masih cari uang di indonesia." Komentar tersebut menunjukkan penilaian negatif yang

disampaikan tanpa upaya untuk menjaga kesantunan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam diskusi mengenai kasus LPDP di media sosial, warganet cenderung menggunakan bahasa yang bersifat menyerang, menyindir, serta merendahkan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa masih cukup sering terjadi dalam interaksi warganet di media sosial. Cahyaningrum, Andayani, dan Setiawan (2018: 46) menegaskan bahwa kesantunan berbahasa menjadi bagian yang penting dalam membentuk karakter atau sikap seseorang.

3. Bentuk Kritik, Sindiran, dan Hujatan Warganet

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi ruang publik baru tempat masyarakat mengekspresikan pandangan, termasuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau lembaga negara. Perbincangan tersebut tidak hanya memuat argumentasi rasional, tetapi juga berisi sindiran, kritik tajam, bahkan hujatan yang diarahkan

kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam kajian pragmatik, prinsip kesantunan berbahasa dipahami sebagai upaya penutur untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam proses komunikasi. Namun, dalam praktik komunikasi di media sosial, batas antara kritik yang santun dan serangan verbal sering kali menjadi kabur. Anonimitas, jarak sosial yang jauh, serta sifat komunikasi yang tidak tatap muka membuat sebagian warganet lebih bebas mengekspresikan penilaian mereka secara langsung tanpa mempertimbangkan implikasi kesantunan.

Kritik yang disampaikan warganet dalam kasus tersebut pada umumnya muncul dalam bentuk pernyataan evaluatif terhadap kebijakan, keputusan, atau perilaku pihak yang dianggap bermasalah. Dalam bentuk yang relatif santun, kritik biasanya disampaikan dengan argumentasi yang rasional, menggunakan pilihan kata yang netral, serta memfokuskan pembahasan pada substansi persoalan.

Di sisi lain, sebagian warganet memilih menyampaikan kritik melalui

bentuk sindiran. Sindiran sering kali hadir dalam bentuk ironi, humor, atau pernyataan yang maknanya tidak sepenuhnya eksplisit. Dalam perspektif pragmatik, sindiran dapat dipahami sebagai strategi tidak langsung (*off record*) untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Walaupun demikian, sindiran tetap berpotensi melanggar prinsip kesantunan apabila maknanya menyinggung atau merendahkan pihak tertentu.

Bentuk yang paling ekstrem adalah hujatan atau serangan verbal yang secara langsung menyerang individu atau kelompok yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari sudut pandang prinsip kesantunan berbahasa, hujatan merupakan bentuk pelanggaran yang jelas karena penutur tidak lagi berupaya menjaga muka (*face*) lawan tutur. Alih-alih menyampaikan kritik terhadap tindakan atau kebijakan, penutur justru menyerang identitas pribadi pihak yang menjadi sasaran.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial sering kali memperlihatkan pergeseran norma kesantunan. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari partisipasi publik

dalam kehidupan demokratis kadang berubah menjadi ekspresi kemarahan kolektif yang tidak lagi mempertimbangkan etika berbahasa.

4. Faktor Penyebab Ketidaksantunan Bahasa di Media Sosial

Dalam kajian pragmatik, ketidaksantunan berbahasa dapat muncul ketika tuturan dianggap melanggar norma kesantunan atau mengancam muka (*face*) pihak lain dalam komunikasi. Pada kasus yang melibatkan Dwi Sasetyaningtyas, terdapat beberapa faktor yang memicu munculnya bahasa tidak santun dalam diskusi di media sosial.

a. Pernyataan Kontroversial dari Dwi Sasetyaningtyas.



Gambar 2 Pernyataan Kontroversial
Dwi Sasetyaningtyas

Tuturan Dwi Sasetyaningtyas yang dianggap merendahkan identitas nasional, seperti pernyataannya yang menyebutkan bahwa "cukup aku saja yang menjadi WNI, anak-anakku jangan", memicu kemarahan warganet sehingga banyak komentar bernada sindiran, ejekan, bahkan hinaan.

b. Status sebagai Pihak yang Terkait dengan Beasiswa Negara. Warganet merasa keberatan karena keluarga Dwi Sasetyaningtyas berkaitan dengan program LPDP yang dibiayai dari dana negara. Ketika seseorang yang mendapatkan manfaat dari dana negara justru dianggap merendahkan

negaranya, warganet menilai hal ini tidak selaras dengan tanggung jawab moral sebagai penerima manfaat.

c. Respons Dwi Sasetyaningtyas yang Dianggap Menantang Warganet.



Gambar 3 Respons Dwi
Sasetyaningtyas

Beberapa balasan atau klarifikasi dari Dwi Sasetyaningtyas di media sosial dipersepsikan oleh warganet sebagai sikap defensif dan cenderung menantang kritik yang muncul. Respons seperti ini justru memperkeruh perdebatan dan memicu warganet untuk memberikan komentar yang lebih kasar.

d. Isu Pelanggaran Kewajiban Penerima LPDP oleh Suaminya. Polemik semakin berkembang ketika warganet menyoroti dugaan bahwa suami Dwi Sasetyaningtyas sebagai penerima beasiswa LPDP belum sepenuhnya menjalankan kewajiban setelah menyelesaikan studi. Pelanggaran ini menambah

kemarahan publik sehingga komentar di media sosial menjadi lebih agresif dan tidak santun.

e. Efek Viral dan Dinamika Opini Publik di Media Sosial. Ketika kasus ini menjadi viral, berbagai komentar negatif mulai bermunculan dan membentuk opini publik tertentu. Ketika sebagian komentar menggunakan bahasa kasar atau sarkastik, pengguna lain cenderung mengikuti pola bahasa yang sama. Fenomena ini menyebabkan terjadinya normalisasi penggunaan bahasa tidak santun dalam diskusi daring (Mislikhah, 2014: 293-294).

5. Dampak Ketidaksantunan Bahasa terhadap Diskusi Publik

Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam diskusi di media sosial tidak hanya mencerminkan rendahnya etika berbahasa, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap jalannya komunikasi itu sendiri. Ketika komentar warganet terhadap kasus LPDP lebih banyak berisi ejekan, sindiran, dan serangan pribadi dibandingkan pendapat yang beralasan, maka diskusi yang seharusnya bisa menjadi ruang kritik yang berguna justru berubah menjadi

ajang pelampiasan kemarahan semata.

Dampak yang paling mudah dilihat adalah bergesernya inti persoalan yang sebenarnya ingin dibicarakan. Masalah utama dalam kasus ini, yaitu soal tanggung jawab penggunaan dana pendidikan negara dan kewajiban moral penerima beasiswa, seharusnya menjadi fokus utama pembicaraan. Namun karena komentar yang muncul lebih banyak menyerang kepribadian orang yang terlibat, masalah pokoknya justru tidak tersentuh. Febriasari dan Wijayanti (2018: 155) mencatat bahwa banyak orang lebih memilih menggunakan bahasa tidak santun karena merasa komunikasi akan terasa lebih bebas dan santai, tanpa menyadari bahwa pilihan tersebut justru merusak kualitas pembicaraan itu sendiri.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah bahasa kasar yang lama-lama dianggap biasa di ruang digital. Ketika komentar tidak santun muncul terus-menerus dan mendapat respons positif dari pengguna lain, secara tidak langsung terbentuk anggapan bahwa bahasa seperti itu adalah hal yang wajar dan bisa diterima.

Selain itu, bahasa yang tidak santun juga berdampak pada orang yang menjadi sasaran komentar. Mahmudi, Irawati, dan Soleh (2021: 107) menjelaskan bahwa tuturan yang merendahkan dan memojokkan orang lain cenderung memicu reaksi balik dari pihak yang dituju. Alih-alih membuka ruang diskusi yang sehat, serangan lewat kata-kata justru mendorong orang yang dikritik untuk membalas dengan nada yang sama kerasnya. Lebih dari itu, banjirnya bahasa tidak santun dalam diskusi publik bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada media sosial sebagai tempat menyuarakan pendapat secara bermartabat (Mislikhah, 2014: 286).

6. Solusi untuk Meminimalkan Ketidaksantunan Berbahasa di Media Sosial

Ketidaksantunan berbahasa dalam ruang publik digital merupakan dampak langsung dari pengabaian prinsip-prinsip komunikasi kooperatif. Solusi fundamental pertama yang harus diterapkan adalah dengan melakukan restorasi pada Maksim Kerja Sama (*Cooperative Principle*) sebagaimana dikemukakan oleh Grice (1975). Solusi praktisnya adalah

setiap pihak, baik alumni maupun instansi, wajib mendasarkan setiap pernyataan publik mereka pada data kontrak yang valid dan rujukan regulasi terbaru, seperti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Penyampaian informasi yang transparan, lugas, dan bebas dari ambiguitas akan menutup ruang bagi netizen untuk membangun spekulasi liar atau melakukan perundungan siber (*cyberbullying*).

Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengadopsi gaya komunikasi "empati digital" yang mengedepankan penghargaan terhadap lawan bicara. Bagi alumni, hal ini berarti memberikan penjelasan dengan sikap rendah hati tanpa meremehkan keresahan masyarakat. Sementara bagi institusi publik, solusi efektifnya adalah menghindari penggunaan bahasa yang bersifat mengancam atau melakukan public shaming. Kesantunan di sini berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan pesan akuntabilitas tersampaikan tanpa memicu resistensi emosional dari masyarakat luas.

Lebih lanjut, solusi yang bersifat struktural dan legal-formal harus diutamakan melalui Formalisasi Kanal Komunikasi dan Kepatuhan Ketat

pada Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 (UU PDP). Institusi publik harus secara konsisten menggunakan jalur korespondensi resmi untuk urusan penagihan atau teguran kontrak guna menghormati kerahasiaan data individu. Dengan mengalihkan sengketa dari panggung digital ke jalur birokrasi yang tertib, institusi dapat menyelesaikan masalah wanprestasi secara efektif tanpa harus menciptakan kegaduhan publik (Nasrullah, 2016).

Sebagai langkah preventif jangka panjang, penerapan literasi digital melalui filter kognitif menjadi solusi bagi setiap aktor yang terlibat dalam diskursus publik. Sinergi antara pemulihan maksim komunikasi, penerapan etika kesantunan yang empatik, serta formalisasi kanal komunikasi sesuai regulasi perlindungan data pribadi merupakan solusi menyeluruh untuk meminimalkan ketidaksantunan dalam isu publik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap komentar warganet pada kasus viral LPDP Dwi Sasetyaningtyas di media sosial, dapat disimpulkan bahwa

ketidaksantunan berbahasa merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dalam diskusi publik di ruang digital. Bentuk-bentuk ketidaksantunan yang paling banyak ditemukan adalah sindiran, ejekan, tuduhan, dan komentar yang merendahkan pihak tertentu.

Dari sisi pelanggaran prinsip kesantunan, maksim penghargaan dan maksim kebijaksanaan menjadi maksim yang paling sering dilanggar. Warganet lebih banyak mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan mereka melalui ejekan dan serangan langsung, dibandingkan menyampaikan kritik secara baik dan mempertimbangkan perasaan pihak lain. Pelanggaran terhadap maksim kesepakatan juga ditemukan, di mana warganet menyampaikan ketidaksetujuan secara tajam tanpa upaya menjaga kesantunan dalam berkomunikasi.

Munculnya bahasa tidak santun dalam kasus ini dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan: pernyataan kontroversial dari pihak yang terlibat, statusnya sebagai penerima manfaat dana negara, dugaan pelanggaran kewajiban moral sebagai alumni LPDP, serta balasan yang dianggap menantang warganet,

dan efek viral yang membuat komentar negatif muncul secara besar-besaran.

Dampak dari semua ini cukup serius. Masalah pokok yang sebenarnya ingin dibicarakan, yaitu soal tanggung jawab penggunaan dana pendidikan negara, justru tenggelam di balik serangan-serangan pribadi yang tidak ada ujungnya. Diskusi publik yang seharusnya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna berubah menjadi ajang pelampiasan emosi yang tidak produktif, dan kepercayaan masyarakat terhadap ruang digital sebagai tempat bersuara secara bermartabat pun semakin terkikis.

Saran yang dapat diberikan: (1) Bagi masyarakat umum, penting untuk selalu memikirkan dampak dari komentar yang akan ditulis dan menyampaikan kritik berdasarkan fakta yang jelas; (2) Bagi pihak yang menjadi sorotan publik, sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik digital; (3) Bagi lembaga terkait seperti LPDP, hasil observasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat program pembinaan bagi penerima beasiswa dalam hal etika berkomunikasi di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningrum, F., Andayani, & Setiawan, B. (2018). Kesantunan berbahasa siswa dalam berdiskusi. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 9(1), 45-54.
- Febriasari, D., & Wijayanti, W. (2018). Kesantunan berbahasa dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 2(1), 140-156.
- Grice, H. P. (1975). *Logic and Conversation*. Dalam Cole, P. & Morgan, J. (Eds.), *Syntax and Semantics*. Academic Press.
- Mahmudi, A. G., Irawati, L., & Soleh, D. R. (2021). Kesantunan berbahasa siswa dalam berkomunikasi dengan guru (kajian pragmatik). *Deiksis*, 13(2), 98-109.
- Mislikhah, S. (2014). Kesantunan berbahasa. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 285-296.
- Nasrullah, R. (2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Vani, M. A., & Sabardila, A. (2020). Ketidaksantunan berbahasa generasi milenial dalam media sosial Twitter. *Pena Literasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2), 90-101.